



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP 2025)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Lakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, selanjutnya disebut Lakip, telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Sekretariat Daerah Nomor : 82/000.8.6.3/XII/2025, tanggal 08 Desember 2025.

Lakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas maupun fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	7
D. Isu-Isu Strategis.....	42
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	47
B. Indikator Kinerja Utama.....	49
C. Rencana Kerja Tahunan.....	52
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	67
B. Analisis Capaian Kinerja.....	70
C. Realisasi Keuangan.....	94
BAB IV PENUTUP	105
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA 2026	
2. RENCANA AKSI	
3. RENCANA KERJA	
4. CASCADING	
5. SKP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Yaitu:
 1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan.
 5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya.

Sementara itu LAKIP memiliki dua Fungsi utama, Pertama, Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua,

laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai upaya memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua Fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal Perangkat Daerah, menjadikan LAKIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang diperoleh merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal Perangkat Daerah, menjadikan LAKIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bagi upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

Berdasarkan kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, secara selaras setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan stratejik tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dicapai. pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

- Tugas Pokok
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program;
 2. subbagian umum, kepegawaian dan hukum; dan
 3. subbagian keuangan;
- c. bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- d. bidang aplikasi dan informatika;

- e. bidang statistik;
- f. bidang persandian; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai Tugas bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan:

- a. bidang komunikasi dan informatika;
- b. bidang statistik; dan
- c. bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- i. merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. menyelenggarakan pembinaan pengembangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
- q. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- 2) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- 4) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- 5) pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 6) pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- 7) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
- 8) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Dinas;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;

- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- r. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h) menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;
- i) menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
- l) melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m) memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- o) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- p) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Program;
- q) memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Dinas;
- r) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s) menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program;

- u) memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;

- j) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- k) menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- l) menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- m) menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o) menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan;
- q) memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. menyusun perumusan kajian di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. menyusun dan merumuskan kajian dampak terhadap usaha dan/atau kegiatan;
- i. mengoordinasikan penyediaan konten informasi, media komunikasi, dan layanan informasi publik;
- j. mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi publik;
- m. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan sosial;
- n. melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah instansi vertikal, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah;

- o. melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
- p. melakukan pengolahan hasil pengumpulan pendapat umum;
- q. melakukan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lingkup nasional, provinsi dan Daerah;
- r. melakukan pengumpulan tema komunikasi publik lingkup nasional, provinsi, dan Daerah;
- s. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- u. melakukan pembuatan konten lokal;
- v. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah atau media internal;
- w. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non pemerintah daerah;
- x. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- y. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah (Kelompok Informasi Masyarakat);
- z. melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- aa. melakukan pelayanan informasi publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- bb. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat;
- cc. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perangkat Daerah;
- dd. melakukan pengelolaan hubungan dengan media.
- ee. menyusun perjanjian kinerja Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;

- ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- gg. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- hh. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik;
- jj. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan infromatika;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dann informatika;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- g. melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- h. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan layanan keamanan informasi *E-Government*;
- i. melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi *E-Government*;
- j. melaksanakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;
- k. melaksanakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- m. melaksanakan pelayanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- n. melakukan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;

- o. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- q. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. melakukan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- s. mengelola pusat data pemerintahan Daerah;
- t. melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- u. mengoordinasikan dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- v. mengoordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- w. melakukan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- x. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- y. melakukan pengembangan dan pengolahan ekosistem kabupaten cerdas;
- z. melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- aa. melakukan pengelolaan *Government Chief Information Officer*;
- bb. menyusun perjanjian kinerja Bidang Aplikasi dan Informatika;
- cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang aplikasi dan informatika;
- dd. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- ee. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika;
- gg. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang statistik, dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
- d. pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang e. Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- g. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang statistik untuk pengamanan informasi;
- i. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan sumber visi di bidang statistik;
- k. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan Daerah;
- l. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat Daerah, badan pusat statistik, dan instansi lainnya;
- m. menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- n. melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- o. menyusun dan mempublikasikan data statistik Daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
- p. menyusun perjanjian kinerja Bidang Statistik;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang statistik;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Statistik;
- u. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;

- g. menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- h. menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- i. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
- m. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
- n. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- o. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- r. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode pengamanan persandian lainnya;
- u. melakukan pengamanan informasi elektronik;
- v. melakukan pengelolaan *security operation center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- w. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- x. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun perjanjian kinerja Bidang Persandian;
- aa. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang persandian;

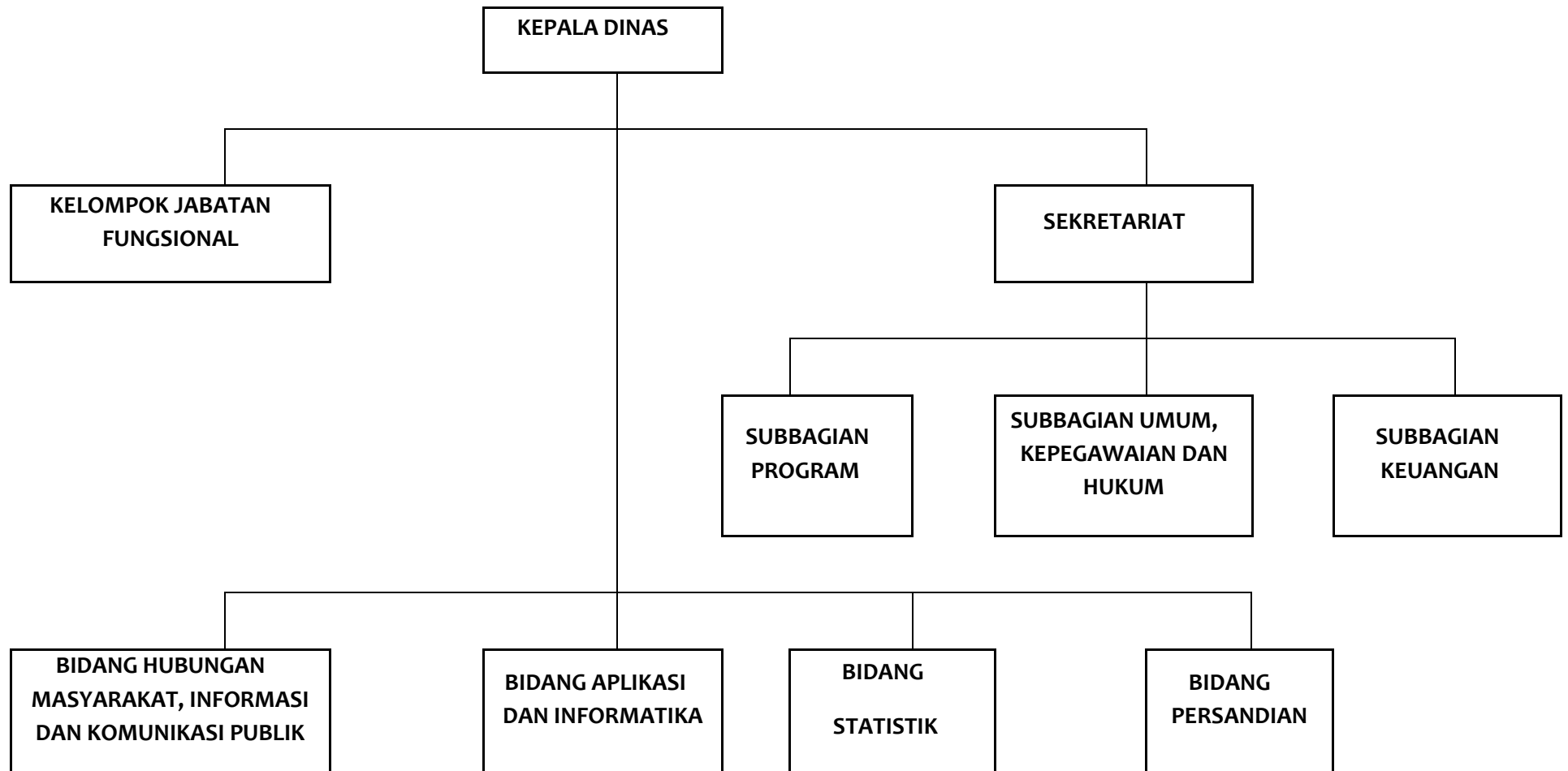
- bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- cc. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Persandian;
- ee. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar



8. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar data Januari s/ d Desember 2025 sebanyak 33 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol.	Jabatan				Ket.
			JPT	Administrator	Pengawas	Pelaksana	
1	Hj. Andi Dwiyanti Musrifah, S.E.,M.M. 197605022014072002	Pembina, IVa	√				Kadis
2	Mutmainnah, S.T 197810252007012020	Penata Tk.1, III/d			√		Kasubag
3	A.A.S. Rakhmat, S.Ap. 197509132007011013	Penata Muda Tk.1, III/b			√		Kasubag
4	Nita Sari, S.H. 198112142015032001	Penata , III/c			√		Kasubag
5	Mar'awati, S.Stp. 199408232016092001	Penata Tk.1, III/d		√			Kabid
6	Andi Chitra Opu, S.Pd. 19730123200701015	Pembina Tk.1, IV/b		√			Kabid
7	A.Sandra Esty Abriani, S.E 198309232009032007	Penata, III/c		√			
8	Nurwahidin, S.Sos 198308242015031003	Penata Muda Tk I, III/b			√		
9	Muhammad Alif, S.Kom 197505132009031003	Penata Tk.I, III/d			√		
10	Andi Afdal Absari, ST 198412042010011028	Penata Tk1 , III/d			√		
11	Iswar Tita Adinata, S.Sos 198405052010011013	Penata , III/c			√		
12	Andi Jaelani.S.P 196711151998031006	Penata Tk.I, III/d			√		
13	Hidayat, ST 197706122014071005	Penata Muda III/a			√		
14	Zaenal Arifin, S.Kom				√		PPPK
15	Yusniati, S.IP.MPA. 198506222011012016	Penata Tk I, III/d			√		
16	Ira, S.P.,M.M. 198502252008012010	Penata Muda Tk I, III/b			√		
17	Suhrawardi 198007022008011015	Pengatur Tk I, IId				√	
19	Asmin Salmin, S.Ag 197201262007011010	Penata, III/c				√	
20	Andi Marwiyah, S.Si,M.M 196903221997032008	Pembina, IV/a				√	
21	Firman 19770032007011016	Penata Muda/ IIIa				√	
22	Ridwan 196909262007011019	Penata Muda/ IIIa				√	
23	Mahmulianto, S.Kom					√	PPPK
24	Heni Anggriati Abd. Rasyid 198612092014072003	Pengatur Muda Tk I, II/b				√	

25	Abdul Rachman Azis 19720113199031005	Penata, III/c				√	
26	Nur Jannah 197806052007012032	Penata Muda/ IIIa				√	
27	Nur Adha, S.Kom					√	PPPK
28	Nurbina, S.T					√	PPPK
29	Indarniati					√	PPPK
30	Rizal					√	PPPK
31	Andi Rizal					√	PPPK
Jumlah			1	4	12	14	

Adapun Sumber Daya yang dimiliki dilihat dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1 : Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai

Status Pegawai	Jumlah
ASN / PNS	26
PPPK	7
PPPK (paruh waktu)	35

Tabel 8.2 : Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	3
III	28
II	2
I	-

Tabel 8.3 : Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Eselon	Jumlah
II	1
III	3
IV	3
Fungsional	6

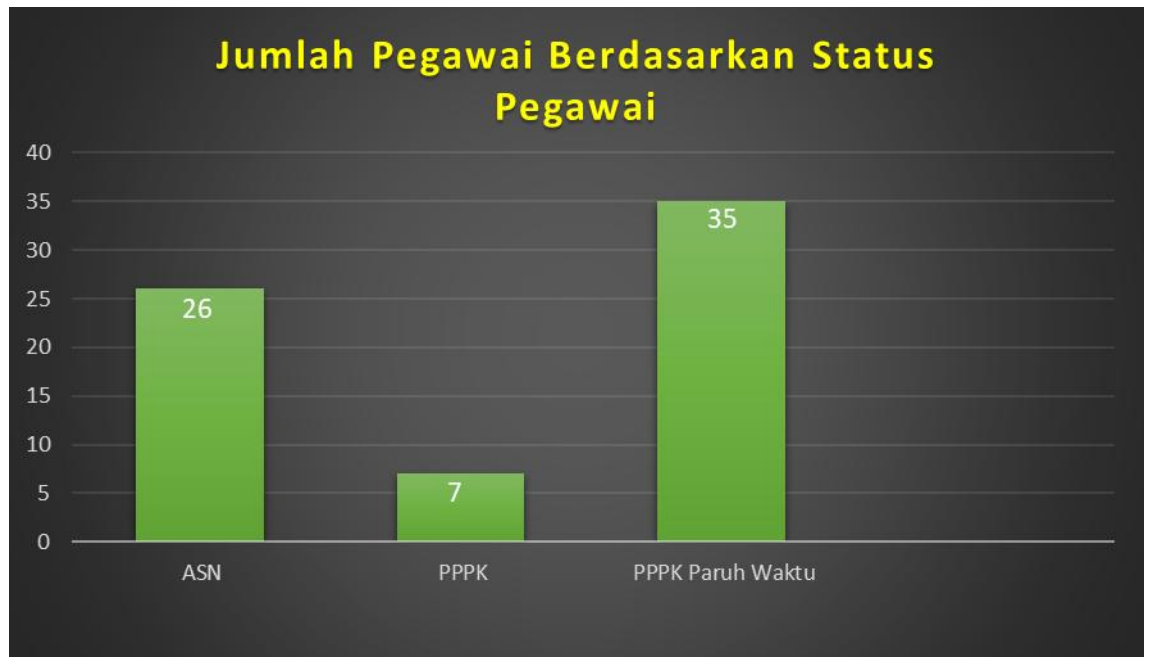
Tabel 8.4 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	6
S1	22
DIV	-
D3	-
SLTA	5
SMP	-
SD	-

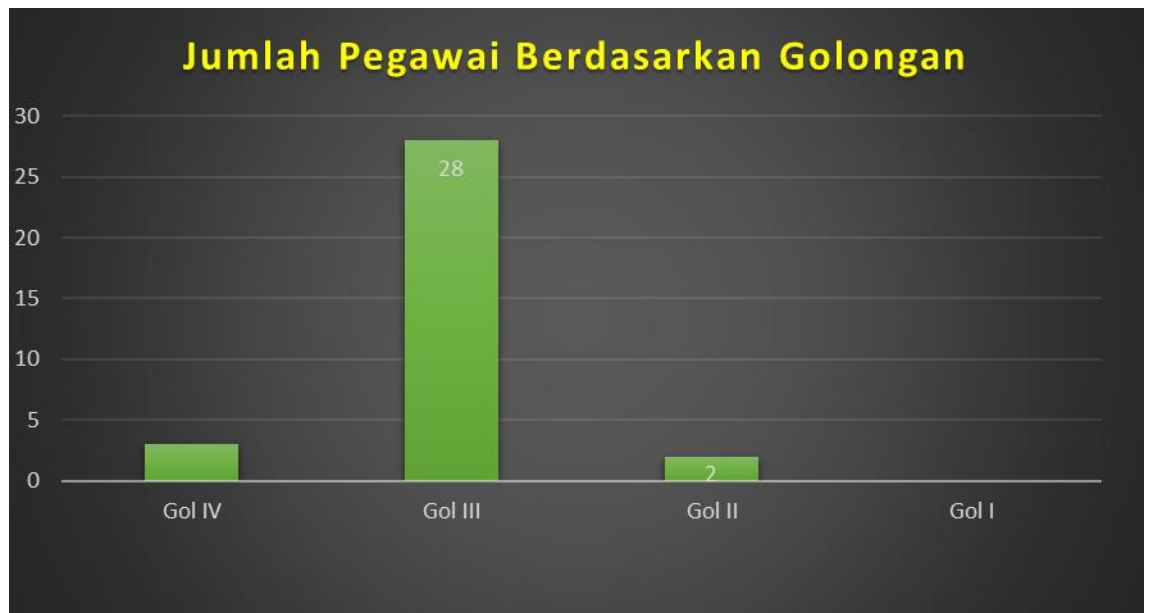
Tabel 8.5 : Jumlah Pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki

Disiplin Ilmu	Jumlah
S1 Hukum	1 Orang
S1 Ekonomi	2 Orang
S1 Teknik	5 Orang
S1 Sosial	2 Orang
S1 Adm. Pemerintahan	2 Orang
S1 Pemerintahan DN	1 Orang
S1 Pendidikan	1 Orang
S1 Sastra	1 Orang
S1 Agama Islam	1 Orang
S1 Statistik	2 Orang
S1 Komputer	4 Orang
S1 Ilmu Pemerintahan	1 Orang

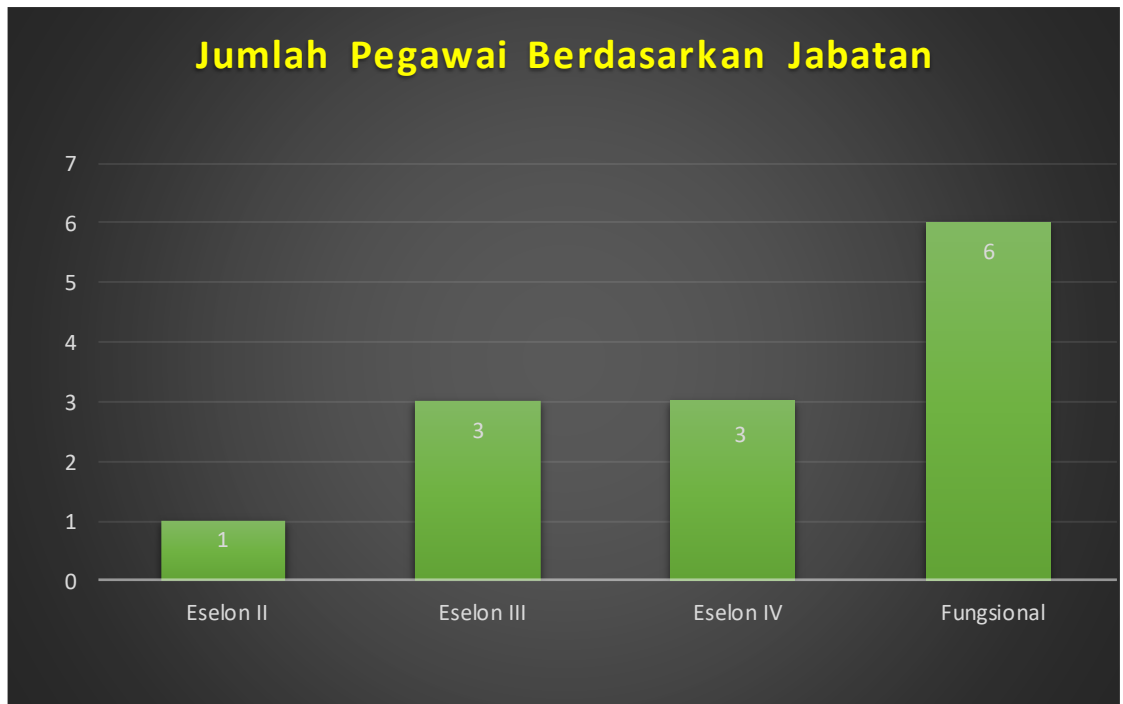
Tabel 8.1



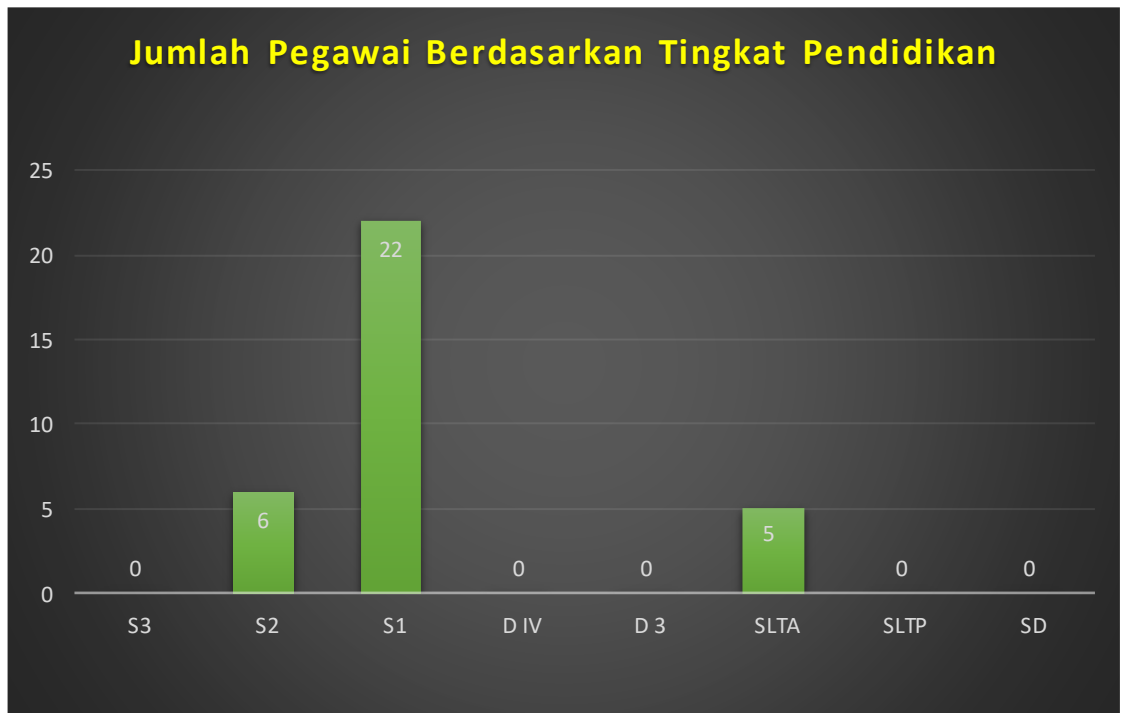
Tabel 8.2 :



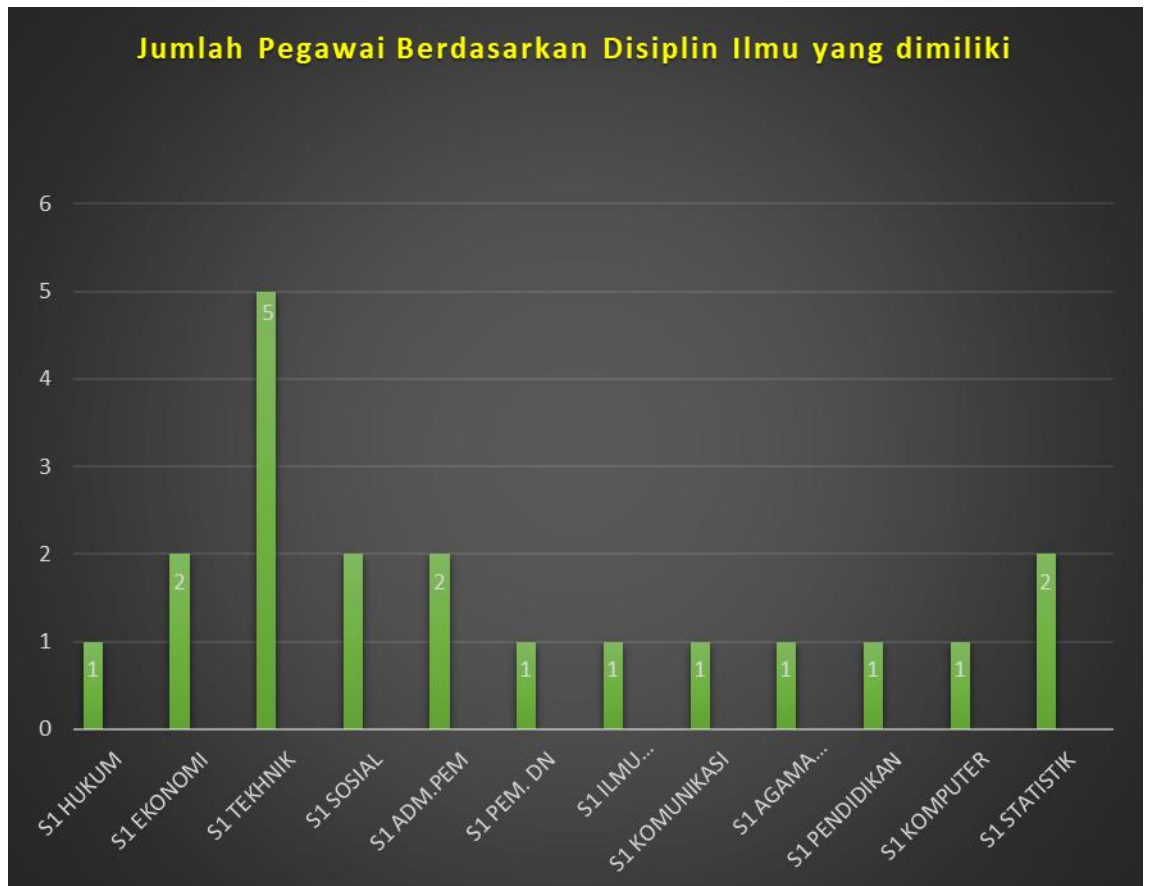
Tabel 8.3



Tabel 8.4 :



Tabel 8.5 :



Tabel 8.6

Data Jabatan Struktural

Jabatan Struktural	Keterangan
Kepala Dinas	Terisi
Sekretaris	-
Kasubag Program	Terisi
Kasubag Keuangan	Terisi
Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Terisi

Tabel 8.7

Data Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional	Jumlah
Analisis Kebijakan	2
Perencana Muda	0
Pranata Humas Muda	3
Pranata Komputer Muda	1
Statistisi Muda	0
Sandiman	0
Manggala Informatika	0

Tabel 8.8

Jumlah tenaga PPPK Paruh waktu

Tenaga PPPK Paruh Wakt	Jumlah
DiskominfoSP	35

Tabel 4.9

Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi

Jabatan Struktural	Jumlah
Sekretaris	-

Bila dilihat dari Kuantitas PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian cukup memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya masih jauh dari harapan, terutama dalam hal disiplin ilmu dan etos kerja.

9. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil (Kendaraan Roda 4)	3 unit	Kondisi Baik
2	Motor (Kendaraan Roda 2)	20 unit	18 dalam Kondisi baik, Rusak Berat 2 Unit
3	AC	4 unit	Kondisi Baik
4	Camera	4 unit	Kondisi Baik
5	HT	2 unit	Kondisi Baik
6	PC	6 unit	Kondisi Baik
7	Laptop	19 unit	Kondisi Baik
8	Scanner	1 Unit	Kondisi Baik
9	Proyektor	1 unit	Kondisi Baik
10	Printer	10 unit	Kondisi Baik
11	TV	3 unit	2 Kondisi Baik, 1 Rusak
12	Lemari Berkas	6 unit	Kondisi Baik
13	Lemari Besi	2 unit	Kondisi Baik
14	Kursi Rapat	39 unit	Kondisi Baik
15	Kursi Kerja	8 unit	Kondisi Baik

16	Meja Kerja	37 unit	Kondisi Baik
17	Lensa Kamera	4 unit	Kondisi Baik
18	Hard Disk	1 unit	Kondisi Baik
19	Tripod camera	1 unit	Kondisi Baik
20	Megaphone /Wireless Mlc	1 unit	Kondisi Baik
21	Dispenser	1 unit	Kondisi Baik
22	Power Supply	1 unit	Kondisi Baik
23	Batrei Kamera NP-FW50 and Slot Charger	1 unit	Kondisi Baik
24	Blits Kamrea	1 unit	Kondisi Baik
25	Gimbal DJI RS 3 Mini	1 unit	Kondisi Baik
26	Kamera Sony A71V	1 unit	Kondisi Baik
27	Kamera Sony ZV-E10	1 unit	Kondisi Baik
28	Lensa Kamera	1 unit	Kondisi Baik
29	Lensa Sony FE-70-2mmf2.8	1 unit	Kondisi Baik
30	Lensa Sony FE-70-200mmP/4	1 unit	Kondisi Baik
31	Starlink	1 unit	Kondisi Baik
32	Tablet Huweai Matepad 11.5S	1 unit	Kondisi Baik
33	Tripod kamera KNF Concept	1 unit	Kondisi Baik

34	Tab Samsung S11	1 unit	Kondisi Baik
35	Gedung	1 unit	Kondisi Baik

D. ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. ***Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.***

Ketersediaan layanan public yang berkualitas, mudah dan cepat adalah prinsip dasar pelayanan public yang baik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari jenis layanan yang tersedia hingga cara layanan tersebut diakses meliputi **Kualitas layanan** dimana layanan public harus memenuhi standar yang memadai baik dalam hal kualitas, kepastian dan profesionalisme, **Kemudahan Akses** bahwa layanan public harus mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan yang tidak perlu, termasuk biaya terjangkau, **Kecepatan layanan** bahwa layanan public harus cepat dan efisien, sehingga tidak membuat masyarakat menunggu lama,

Jenis Layanan bahwa ketersediaan layanan public yang berkualitas mencakup berbagai jenis layanan seperti layanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan regulatif. **Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)** dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas, kemudahan dan kecepatan layanan public. **Unit Pelayanan Desa (UPD)** dapat meningkatkan aksesibilitas layanan public di daerah pedesaan, memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. **Standar Pelayanan** harus ditetapkan untuk memastikan kualitas dan konsistensi layanan yang diberikan.

2. ***Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan Mengembangkan infrastruktur untuk penguatan jaringan internet dalam rangka Penyediaan akses internet dari Perangkat Daerah dan/atau dari Instansi Vertikal di luar jam kerja untuk digunakan UMKM dalam mempromosikan produknya dan membuka peluang bagi masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah berfokus pada peningkatan konektivitas, keamanan, dan efisiensi melalui pembangunan jaringan fisik, penguatan regulasi, kolaborasi antar instansi dan pemanfaatan teknologi. Penguatan kebijakan dan regulasi dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur digital. Sinkronisasi dan harmonisasi juga dilakukan untuk menyelaraskan regulasi di tingkat daerah untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

3. **Penyediaan Data yang Akurat dan Relevan di untuk Pembangunan**

Penyediaan Data yang akurat dan relevan membutuhkan sumber yang terpercaya dengan metode pengumpulan meliputi pemanfaatan data sekunder dan pengumpulan data statistik sektoral perangkat daerah. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan secara objektif dan konsisten. Penyediaan Data Statistik Sektoral penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat, memfasilitasi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti, serta meningkatkan keterbukaan informasi public melalui data yang terintegrasi dan terpusat, memudahkan koordinasi antar instansi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

4. ***Pengamanan Informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi***

Pengamanan Informasi pada system elektronik atau keamanan SPBE sangat penting untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan public. Pengamanan Informasi SPBE antara lain dengan Penerapan manajemen keamanan informasi (SMKI), Penyusunan Prosedur Pengendalian Informasi, Pengelolaan Pihak ketiga, Penerapan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE, Pemnatauan dan Audit Keamanan, Edukasi dan pelatihan, Penanganan Insiden keamanan dan Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman melibatkan penerapan berbagai teknologi dan praktik keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serangan siber dan gangguan lainnya. Ini mencakup pengamanan jaringan fisik, enkripsi data, firewall, autentifikasi pengguna dan pemantauan terus-menerus. Beberapa aspek penting dalam pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman meliputi **enkripsi data**, menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah data menjadi

bentuk yang tidak terbaca oleh pihak yang berwenang, **Firewall** menggunakan firewall untuk menfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah. **Autentifikasi dan otorisasi** untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentifikasi dua factor, dan pemeriksaan identitas. **Keamanan Jaringan** mengamankan perangkat jaringan seperti router dan switch dengan mengupdate firmware, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memblokir akses yang tidak sah. **Keamanan aplikasi** mengamankan aplikasi yang digunakan dalam jaringan dengan menggunakan praktik pengembangan yang aman dan menguji aplikasi secara berkala untuk kerentanan. **Keamanan End-Point** mengamankan perangkat akhir seperti computer dan perangkat selular dengan menggunakan antivirus, software anti-malware, dan patch keamanan secara berkala. **Pemantauan dan Log** memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas pengguna untuk mendeteksi ancaman dan serangan. **Kebijakan keamanan** dengan menetapkan kebijakan keamanan yang jelas untuk semua pengguna dan perangkat dalam jaringan. **Pendidikan dan Kesadaran** dengan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman siber dan memberikan pelatihan tentang praktik keamanan yang baik. Dengan menerapkan berbagai aspek keamanan ini secara bersama-sama, jaringan telekomunikasi data dapat menjadi lebih aman dan terlindungi dari berbagai ancaman.

5. **Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.**

Pengembangan sumber daya aparatur adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah. Ini melibatkan berbagai metode seperti pelatihan, diklat, Pendidikan dan pengembangan karir. Tujuannya adalah

untuk mewujudkan aparatur yang professional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan public yang efektif dan efisien. Pengembangan Sumber daya aparatur dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatir pemerintah agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, sehingga pelayanan public dapat ditingkatkan. Metode pelatihan meliputi Diklat dalam jabatan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan lain-lain. Metode Pendidikan dengan melanjutkan Pendidikan formal, studi lanjut. Metode pengembangan karir meliputi mutasi kerja, promosi jabatan. Manfaat pengembangan sumber daya aparatur antara lain peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan public dan peningkatan moral dan disiplin.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020, dan mulai dijalankan pada Tahun 2021.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Digitalisasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Didesentralisasikan ke Kabupaten		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada setiap urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5
		Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	50 %	50 %	70 %	90 %	90 %
		Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat III
3.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	A
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	A
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	CC	B	BB	BB	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo-SP	70	72,50	80	85	85

B. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator kinerja utama dengan keputusan Kepala Dinas KominfoSP Nomor : 21/III/2024, Tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut :

Tabel 1

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	Jumlah PD yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan x 100 Jumlah PD	Persen	70 %
2.	Meningkatnya tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE	Nilai	2,8
3.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Data Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesiax 100 Jumlah Data Statistik Sektoral	Persen	80 %
4.	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Penerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Peringkat	Tingkat II
5.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	Predikat AKIP	Predikat	BB

		- Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Opini / Predikat SAP	Predikat	BB
		- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP	Hasil Survey Responden	Nilai	80

C. Rencana Kerja Tahunan

Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Diseminasi Informasi
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Penyusunan Konten

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - Koordinasi Penyusunan data/atau reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo
 - Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar

4. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan kegiatan dengan Total Anggaran Sebesar Rp. 5.136.818.450, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan anggaran sebesar Rp. 4.802.750.600, Urusan Pemerintahan bidang Statistik Rp. 109.384.150 dan Urusan

Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp. 224.683.700. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.794.891.550 dan Belanja Modal sebesar Rp.341.926.900. Dari total anggaran sebesar Rp. 5.136.818.450 terealisasi sebesar Rp. 4.782.923.827, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 353.894.623, atau terealisasi sebesar 93,11 %.

Perjanjian Kinerja 2025

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Bupati Kepulauan Selayar ditetapkan, sebagaiberikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	%	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %
2.	Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	50 %	50 %	70 %	90 %	90 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	%	50 %	75 %	80 %	85 %	90 %
4.	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat III
5	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	BB	BB	A
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Nilai	CC	B	BB	BB	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo-SP	Nilai	70 %	72,50 %	80 %	85 %	85 %

Jumlah Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 5.136.818.450 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan anggaran sebesar Rp. 4.802.750.600 ,
2. Urusan Pemerintahan bidang Statistik Rp. 109.384.150 dan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp. 224.683.700.
4. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.794.891.550 dan Belanja Modal sebesar Rp.341.926.900.

Dari total anggaran sebesar Rp. 5.136.818.450 terealisasi sebesar Rp. 4.782.923.827, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 353.894.623, atau terealisasi sebesar 93,11 %.

, -

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.136.818.450
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.777.630.347
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu		21.020.150
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.986.850
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.099.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.433.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2.500.400

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.500.200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	2.940.299.847
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.919.949.047
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	11.306.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.507.200
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	3.536.300
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	347.805.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	169.438.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.675.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.519.400

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	147.172.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	229.664.950
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.504.900
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.140.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	187.020.050
V	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	238.840.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	61.750.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	92.360.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9.870.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.860.000
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100	601.769.750
I	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100	601.769.750

	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	201.163.250
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13 KIM	24.925.900
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Dokumen	252.825.900
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	72 %	52.004.100
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	24 Media	11.798.200
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3.500 Konten	27.234.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	9 Orang	49.046.500
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	100	423.350.503
I	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100	11.936.000
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	1 Dokumen	11.936.000

II	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100	411.414.503
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	93.349.700
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	23.053.500
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	21.110.400
	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh perangkat daerah dan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	14.998.800
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	37 Perangkat Daerah	167.902.203
	Penyediaan akses Internet untk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	28 Perangkat Daerah	90.999.900
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100	109.384.150

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	109.384.150
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100	109.384.150
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	14 Orang	25.290.700
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	100 %	7.246.500
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	28.509.500
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	36.239.550
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	12.097.900

E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			224.683.700
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100	224.683.700
I	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Keamanan yang Dievaluasi	100	151.793.800
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	10.800.400
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	86.156.500
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	15.325.500
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 OPD	39.511.400
I	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100	72.889.900
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 OPD	72.889.900

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian 2025**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan cara untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang ditentukan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Tabel 1
CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahanx 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persen	100 %	100 %
2.	Meningkatnya tingkat kematangan domain, kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE	Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronikx 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral	Persentase data statistic sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia	Jumlah data statistic sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesiax 100 Jumlah data statistic sektoral	Persen	85 %	46,99 %
4.	Meningkatnya penerapan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Penerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Peringkat	Tingkat II	Tingkat III
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	BB	B
		- Laporan Keuangan sesuai SAP	Opini/ Predikat SAP	Nilai	BB	-

		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo	Hasil Survey Responden	Persen	80	0
--	--	--	------------------------	--------	----	---

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025, serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun bersangkutan, capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat digambarkan, sebagai berikut :

Untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 6

Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
A	Digitalisasi Penyelenggaraan seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten				
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	$= \frac{100 \times 100}{100}$ = 100	Diskominfo SP (Bidang Humas)
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	$= \frac{100 \times 100}{100}$ = 100	Diskominfo SP (Bidang Humas)

Tujuan 1. Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten dengan Indikator Persentase pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik pada Tahun 2024 ditargetkan 90 % dengan capaian 100 %,.. Sedangkan untuk Tahun 2025 ditargetkan 100 % dan terealisasi 100 %. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target dimana semua perangkat daerah telah menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik sebagai salah satu bentuk digitalisasi pelayanan dari tanda tangan manual ke tanda tangan melalui aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan pada Tahun 2024 dengan target 90 %, terealisasi 100 % dan Tahun 2025 dengan target 100 % terealisasi 100 % dengan factor pendukung keberhasilan pencapaian target yaitu semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, beberapa perangkat daerah telah melaksanakan layanan digital antara lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (<https://katalog.onaproc.id>) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, layanan Perizinan (<https://oss.go.id/>) Dinas Penanaman Modal, Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana (<https://bpbdd.kepulauanselayarkab.go.id>) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Layanan Keuangan (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, layanan Perpustakaan Elektronik (<https://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id/>) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan (<https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/>) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Layanan Kepegawaian (<https://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/>) pada BKPSDM, Layanan Informasi Publik (<https://lapor.go.id/>) pada Dinas KominfoSP, Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD (<https://jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>), dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (<https://kepulauanselayar.spmb.id/>) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
B	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
1	Indeks SPBE	3,0	2,77	$= \frac{2,77 \times 100}{3,0}$ = 92,33	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	$= \frac{100 \times 100}{100}$ = 100	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
3	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	85 %	46,99 %	$= \frac{406 \times 100}{864}$ = 46,99 %	Diskominfo SP (Bidang Statistik)
4	Indeks Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	II	III	100 %	Diskominfo SP (Bidang Persandian)

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE dengan target 3,0 Pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nilai Indeks SPBE 2,77. Di Tahun 2024 capaian Indeks SPBE 2,57. Nilai Indeks SPBE berdasarkan penilaian kebijakan informasi terkait tata Kelola SPBE, Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit TIK, Penerapan manajemen SPBE, Penyelenggara SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perencanaan Strategis SPBE. Faktor penghambat sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai karena

1. dokumen pendukung pada domain kebijakan terkait peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati tentang penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah tidak terupload. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE tidak terupload pada Domain Tata Kelola
2. serta sreenshoot 10 Indikator manajemen SPBE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen peta rencana SPBE pada Domain Tata Kelola tidak terupload di aplikasi tauval.spbe.go.id.

Faktor pendukung sehingga Nilai Indeks SPBE dari Tahun 2024 meningkat dari 2,57 ke 2,77 karena pada Domain kebijakan telah dilaksanakan reuiu Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE yang dijadikan sebagai bukti dukung pada Domain Kebijakan.

Sasaran 2. Meningkatnya Tingkat kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 dengan target 90 % terealisasi 100 % dan Tahun 2025 dengan target 100 % dan terealisasi 100 %. Faktor pendukung tercapainya target karena semua perangkat daerah telah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di aplikasi MANCA.

Sasaran 3. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tahun 2025 dengan target 85 % dan terealisasi 46,99 % yaitu terdapat 406 Data statistik sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia dari

864 data statistic sektoral. Sedangkan Tahun 2024 dari target 80 % terealisasi 21,39. Faktor Penghambat sehingga target tidak tercapai adalah :

1. Faktor teknis dan infrastruktur yaitu belum tersedianya portal aplikasi satu data Selayar
2. Faktor koordinasi dan Tata Kelola yaitu masih kurangnya koordinasi antara walidata (diskominfo), Pembina data (BPS), dan produsen data (Perangkat Daerah)
3. Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu masih terbatasnya SDM di perangkat daerah yang memiliki kompetensi teknis di bidang statistik
4. Faktor Metodologi dan kualitas data yaitu data statistik seringkali tidak diperbarui tepat waktu.

Faktor pendukung sehingga capaian dari Tahun 2024 meningkat di Tahun 2025 dari 21,39 % ke 46,99 % dikarenakan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan Bimbingan teknis penyusunan metadata dan rekomendasi kegiatan statistik.

Sasaran 4. Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan target Tingkat II dan terealisasi Tingkat II s/d V atau senilai 749, yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai kategori hanya terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 114, Pengelolaan Resiko dengan nilai 72, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan nilai 183, Pengelolaan Aset dengan nilai 151, Teknologi Keamanan Informasi dengan nilai 168, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 61 dan Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga dengan Nilai 100, meningkat dari Tahun 2024 yang hanya senilai 684, yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai kategori hanya terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 65, Pengelolaan Resiko dengan nilai 70, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan nilai 180, Pengelolaan Aset dengan nilai 147, Teknologi Keamanan Informasi dengan nilai 165, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 57 dan Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga dengan Nilai 100. Faktor pendukung tercapainya target adalah telah dilakukannya asesmen resiko secara berkala terhadap sistem informasi, penerapan kontrol keamanan dan melakukan penilaian mandiri secara berkala Indeks KAMI.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
C	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB			Diskominfo SP (Sekretariat)
2	Nilai SAKIP	BB	B	65,1	Diskominfo SP (Sekretariat)
3	Laporan Keuangan sesuai SAP	BB	-		Diskominfo SP (Sekretariat)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP	80	80,85	0	Diskominfo SP (Sekretariat)

Tujuan 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target B. Tahun 2025 tidak ada nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran 5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2025 adalah 65,1 (B) meningkat dari Tahun 2024 dengan nilai 60 (C). Faktor pendukung peningkatan capaian Nilai SAKIP Diskominfo adalah dukungan aktif dari Pimpinan dan segenap ASN Diskominfo dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. 2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP untuk Tahun 2025 senilai 0 karena dari target 150 responden hanya 34 yang melakukan umpan balik.

Tabel 7

Capaian Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
A	Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas	100	100	$= \frac{100 \times 100}{100}$ $= 100 \%$	Diskominfo SP (Bidang Humas)
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	$= \frac{100 \times 100}{100}$ $= 100 \%$	Diskominfo SP (Bidang Aptika)

Urusan 1. Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas ditargetkan 100 % dengan capaian Tahun 2025 adalah 100 %. Target tercapai karena terdapat 7 layanan system informasi dari 7 layanan yang ditargetkan, yaitu (Youtube (kominfo selayar), Facebook (@keulauan_selayar), Instagram (@keulauan selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose).

Urusan 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2025 terealisasi 100 % karena terdapat 15 layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 15 Layanan Publik yang ada.

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online	Ket
1.	Bagian Pengadaan barang dan Jasa SETDA	Layanan Pengadaan Secara Elektronik https://katalog.inaproc.id	-
3.	Dinas Penanaman Modal	Layanan Perizinan https://oss.go.id/	
4.	BPBD	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana https://bpbd.kepulauanselayarkab.go.id/	
5.	BPKAD	Layanan Keuangan https://sipd-ri.kemendagri.go.id/	
6.	Inspektorat Kabupaten	Layanan Pengaduan Masyarakat https://gol.kpk.go.id/	
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan Elektronik https://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id/	
8.	RSUD KH Hayyung	Layanan Antrian Online	
9.	Puskesmas Benteng	Layanan Antrian Online	
10.	Bagian Hukum Setda	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/	
11.	BKPSDM	Layanan Kepegawaian https://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/	
12.	DiskominfoSP	Layanan Informasi Publik https://lapor.g.id/	
13.	Sekretariat DPRD	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan https://jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/	
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Layanan Kepariwisata dan Layanan Ekonomi Kreatif http://pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id/	
15.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru https://kepulauanselayar.spmb.id/	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
B	Urusan Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	38	38	$= \frac{38 \text{ OPD}}{38 \text{ OPD}} \times 100$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Statistik)
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38	38	$= \frac{38 \text{ OPD}}{38 \text{ OPD}} \times 100$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Statistik)

Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % disebabkan karena semua OPD telah menggunakan data statistic dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2025 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD.

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
C	Urusan Persandian				
1	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100	100	$= \frac{100 \times 100}{100}$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Persandian)

Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2025 dari target 100 % tercapai 100 % karena Tahun 2025 terdapat 27 Sistem elektronik yang di Assesment/Audit dari 27 Sistem elektronik yang aktif :

1. bcbd.kepulauanselayarkab.go.id
2. Inspektorat.kepulauanselayarkab.go.id
3. Siladus.kepulauanselayarkab.go.id
4. putr.kepulauanselayarkab.go.id
5. patroltaru.kepulauanselayarkab.go.id
6. perputakaan.kepulauanselayarkab.go.id
7. bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
8. bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id
9. dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
10. jdih.kepulauanselayarkab.go.id
11. sibija.kepulauanselayarkab.go.id
12. lpse.kepulauanselayarkab.go.id
13. dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
14. pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
15. itourism.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
16. bkd.kepulauanselayarkab.go.id
17. apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
18. pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
19. satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
20. pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
21. simpole.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
22. sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
23. tubel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
24. simpeg.kepulauanselayarkab.go.id
25. ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id
26. dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
27. dikbud.kepulauanselayarkab.go.id

2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
		352	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 ----- Jumlah Perangkat Daerah	26x 100 38	68,42	Bidang Aptika	Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo-SP sebanyak 26 Perangkat Daerah
		353	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo x 100 ----- Jumlah Perangkat Daerah	26x 100 38	68,42		Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoSP sebanyak 28 Perangkat Daerah
		354	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (ya atau tidak)		ya		Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo-SP adalah TTE (Tanda Tangan Elektronik)
		355	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang	Jumlah Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan	24x 100 24	100 %	Bidang Aptika	Terdapat 24 Permintaan Fasilitas Zoom Meeting Tahun 2023 (Terlaksana)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	sub domain instansi dengan PM Kominfo No. 5/2015 -----x 100 Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintahan daerah				
		356	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar -----x 100 Jumlah Perangkat Daerah	12x 100 38	31,58 %	Bidang Aptika - Data Terlampir
		357	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan -----x100 Jumlah Perangkat Daerah	14x100 37	36,84 %	Bidang Aptika - Data Terlampir
		358	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik -----x 100 Jumlah Layanan	2x100 12	16,67 %	Bidang Aptika Tanda Tangan Elektronik dan SP4N LAPOR!
		359	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik -----x 100	2x100 12	16,67 %	Bidang Aptika Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			Jumlah Layanan					
		360	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Sistem Elektronik}} \times 100$	2x100 31	6,45 %	Bidang Aptika	Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati
		361	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah Layanan Publik dan layanan administrasi}} \times 100$	15x100 15	100 %	Bidang Aptika	Data Terlampir
		362	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		363	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data dipusat}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		364	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui data sesuai siklus jenis data}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		365	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki system Elekonikx 100 Jumlah Perangkat Daerah	14x 100 38	36,84 %	Bidang Aptika	Data Terlampir
		366	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah OPD yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city X 100 Jumlah Semua OPD	7x100 38	18,42 %	Bidang Aptika	Data terlampir
		367	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN yang bersertifikatx 100 Jumlah ASN DiskominfoSP	0x100 33	0 %	Bidang Aptika	-
		368	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah	-	-	Bidang Aptika	Tahun 2025 terdapat Perbup terkait Implementasi e-government
		369	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah mitra strategisx 100 Jumlah keseluruhan mitra	6x100 6	100 %	Bidang Humas	Terdapat 6 Media sebagai mitra strategis yang diajak bekerjasama dalam penyebarluasan informasi
		370	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan	Jumlah Konten Informasi x 100 Target Konten 2025	2.125x100 3.500	60,71 %	Bidang Humas	Data Terlampir

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		strategi komunikasi (STRAKOM)					
		371 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOPx 100 Jumlah Diseminasi dan Layanan Informasi Publik	8x100 8	100 %	Bidang Humas	Data Terlampir

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERSANDIAN						
		417 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah Kegiatan Strategis yang Teramankanx 100 Jumlah Kegiatan Strategis yang Ada	683x100 683	100 %	Bidang Persandian	Terdapat 683 Kegiatan Strategis yang teramankan dari 683 Kegiatan Strategis

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		418	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah Sistem Elektronik yang Menerapkan SMKI dan Diamankan Sertifikat Elektronik atau Aplikasi Penyandianx 100 Jumlah Sistem Elektronik yang Ada	2x100 26	7,69 %	Bidang Persandian	Email SANAPATI https://mail.sanapati.net/owa http://tte.kepulauanselayarkab.go.id /
		419	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah Diaudit Resiko Katregori Rendah X 100 Jumlah Sistem Elektronik yang Ada	26x100 26	100 %	Bidang Persandian	Data Terlampir
		420	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankanx100 Jumlah titik PHKS	38x100 38	100 %	Bidang Persandian	Terdapat 38 Titik diamankan di 38 Perangkat Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	STATISTIK						
	Belum Ada	410	Tersedianya buku profil daerah		Belum Ada		Tidak dianggarkan
		411	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	7	Bidang statistik Data Terlampir
		412	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	34 kompilasi	34 Kompilasi	OPD/Instansi Vertikal Data Terlampir
		413	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	1	Dinas Perhubungan Data Kunjungan Kapal dan Penumpang pada Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar
		414	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	Belum Ada	- Masih dalam tahap pendataan
		415	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoralx 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	33x100 38	86,84 %	Perangkat Daerah Data Terlampir
		416	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoralx100% Jumlah indikator statistik sektoral	115x100 115	100 %	Perangkat Daerah Data Terlampir

1.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika						
		71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	26x 100 38	68,42 %	Bidang Aptika Data Terlampir
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	15x 100 15	100 %	Bidang Aptika Data Terlampir
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk	98.717x100 143.580	68,75 %	Data dari Disdukcapil Jumlah Masyarakat Usia 14-64 Tahun

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1 Persandian								
		82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	684x 100 918	74,50 %	Bidang Persandian	Indeks KAMI Terlampir

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1 Statistik								
		80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	38 OPDx 100 38 OPD	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	38 OPDx 100 38 OPD	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2025	Sumber Data	Keterangan
1	Transparansi dan Partisipasi Publik						
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	38 X 100 38	100 %	Kepulauan selayarkab. go.id Data Terlampir

C. Realiasi Keuangan

No	OPD	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan					Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		88,5	5.136.818.450	87,05	4.782.923.827		
		2.16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,5		71,51			
		2.16	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	88		91,00			
		2.16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	21.020.150	100	17.220.062		
		2.16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.986.850	3 Dokumen	3.603.439		
		2.16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.036.961		
		2.16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.099.000	1 Dokumen	2.242.435		

		2.16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.100	1 Dokumen	1.577.976		
		2.16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.433.600	1 Dokumen	1.861.377		
		2.16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.400	1 Laporan	2.098.455		
		2.16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.500.200	2 Laporan	3.799.419		
		2.16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	2.940.299.847	91.12	2.679.235.650		
		2.16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	2.919.949.047	33 Orang	2.661.822.815		
		2.16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.306.400	1 Dokumen	9.820.170		
		2.16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.900	1 Laporan	2.679.472		

		2.16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.507.200	12 Laporan	3.041.178		
		2.16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	3.536.300	12 Laporan	2.337.900		
		2.16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	347.805.400	99,05	344.515.155		
		2.16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	169.438.900	1 Paket	166.335.317		
		2.16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.675.100	1 Paket	25.657.913		
		2.16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	5.519.400	1 laporan	5.404.125		
		2.16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	147.172.000	120 laporan	147.117.800		
		2.16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	229.664.950	91.03	209.071.018		
		2.16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.504.900	1 Laporan	3.943.899		
		2.16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.140.000	1 Laporan	25.239.810		

		2.16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	187.020.050	1 Laporan	179.887.309		
		2.16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	238.840.000	98.37	234.957.955		
		2.16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	61.170.000	1 Unit	61.170.000		
		2.16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	92.360.000	10 Unit	89.061.955		
		2.16	01	2.09	0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dielihara	5 Unit	9.870.000	5 Unit	9.866.000		
		2.16	01	2.09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 unit	74.860.000	1 unit	74.860.000		
		2.16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100 %	601.769.750	99,42	598.265.453		
		2.16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100 %	601.769.750	99,42	598.265.453		

		2.16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	201.163.250	1 Laporan	199.915.454		
		2.16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13 KIM	10.005.900	13 KIM	9.502.354		
		2.16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Dokumen	24.925.900	1 Dokumen	24.396.422		
		2.16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	72 %	252.825.900	68,75 %	252.397.197		
		2.16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	24 Media	52.004.100	6 Media	51.857.848		
		2.16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3.500 Konten	11.798.200	2.125 Konten	11.616.765		
		2.16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	9 Orang	49.046.500	3 Orang	48.579.413		

		2.16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100 %	423.350.503	87,97	372.427.773		
		2.16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100 %	11.936.000	33,11	3.952.304		
		2.16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	1 Dokumen	11.936.000	1 Dokumen	3.952.304		
		2.16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100 %	411.414.503	90 96	368.475.469		
		2.16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	93.349.700	1 Dokumen	91085.480		
		2.16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	23.053.500	0	22.818.290		
		2.16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	21.110.400	0	19.777.339		

		2.16	03	2.02	0022	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh perangkat daerah dan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	14.998.800	1 Dokumen	13.202.308		
		2.16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	37 Perangkat Daerah	167.902.203	26 Perangkat Daerah	164.814.500		
		2.16	03	2.02	0030	Penyediaan akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	28 Perangkat Daerah	90.999.900	26 Perangkat Daerah	56.777.552		
		2.20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
		2.20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah	100 %	109.384.150	95.21	104.145.740		
							Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah						

		2.20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistic sektoral dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	37	109.384.150	38	104.145.740		
		2.20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	14 Orang	25.290.700	36 Orang	23.721.957		
		2.20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	100 %	7.246.500	100 %	5.702.985		
		2.20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	28.509.500	27 Perangkat Daerah	27.793.730		
		2.20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	36.239.550	1 Dokumen	35.173.038		
		2.20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	12.097.900	1 Dokumen	11.754.030		
		2.21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
		2.21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	224.683.700	99.29	223.085.021		

		2.21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Keamanan yang Dievaluasi	100 %	151.793.800	99,11	150.444.908		
		2.21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	10.800.400	1 Dokumen	10.461.416		
		2.21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	86.156.500	1 Dokumen	85.959.080		
		2.21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Dokumen	15.325.500	1 Dokumen	14.708.530		
		2.21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	39.315.882	1 Perangkat Daerah	39.315.882		
		2.21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	79.356.000	89,63	71.126.600		
		2.21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	72.889.900	38 Perangkat Daerah	72.640.113		

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebesar Rp. 4.782.923.827,- atau terserap 93,11% dari Total Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.136.818.450,-. Uraian Realisasi Urusan dan Program sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran per Urusan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Urusan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4.804.750.600	4.455.693.066	92,74 %	349.057.534
2.	Urusan Bidang Statistik	109.384.150	104.145.740	95,21 %	52.384.410
3.	Urusan Bidang Persandian	224.683.700	223.085.021	99,29 %	1.598.679
TOTAL		5.138.818.450	4.782.923.827	93,11	355.894.623

2. Penyerapan anggaran per program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.777.638.347	3.484.999.840	92,25	292.630.507
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	601.769.750	598.265.453	99,38	3.504.297
3.	Aplikasi Informatika	423.350.503	372.427.773	87,97	50.922.730
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	109.384.150	104.145.740	95,21	5.238.410

5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	224.683.700	223.085.021	99,29	1.598.679
TOTAL		5.136.818.450	4.782.923.827	93,11	353.894.623

3. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.919.949.047	2.661.822.815	91,16	258.126.232
2.	Belanja Barang	1.874.942.503	1.782.489.184	95,07	92.453.309
3.	Belanja Modal	341.925.900	338.611.818	99,03	3.315.082

Dari table tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2025 ini sebesar Rp. 5.136.818.450,- Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Realisasi sampai dengan Desember sebesar Rp. 4.782.923.827,- (Empat Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan jika dipersentasekan mencapai 93,11 %. Berdasarkan Tabel di atas terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu satu tahun dapat disampaikan bahwa dari lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan Lima Puluh Dua (52) sub kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,11% artinya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesungguhnya merupakan dokumen evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Dari keseluruhan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 93,11%. Demikian LAKIP Perangkat Daerah ini disusun sebagai bahan tindak lanjut seperlunya.

Benteng, 5 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.

Pangkat. Pembina

NIP. 19760502 201407 2 002